

REVIVING CONSTITUTIONAL SPIRIT WITHIN THE INDONESIAN POLICY SYSTEM & PROCESS

DRAFT PENGANTAR DISKUSI TERBATAS JFAK-LAN

Jakarta, 30 APRIL 2014

Oleh

Prof Mustopadidjaja AR; SE, MPIA, PhD

POKOK BAHASAN

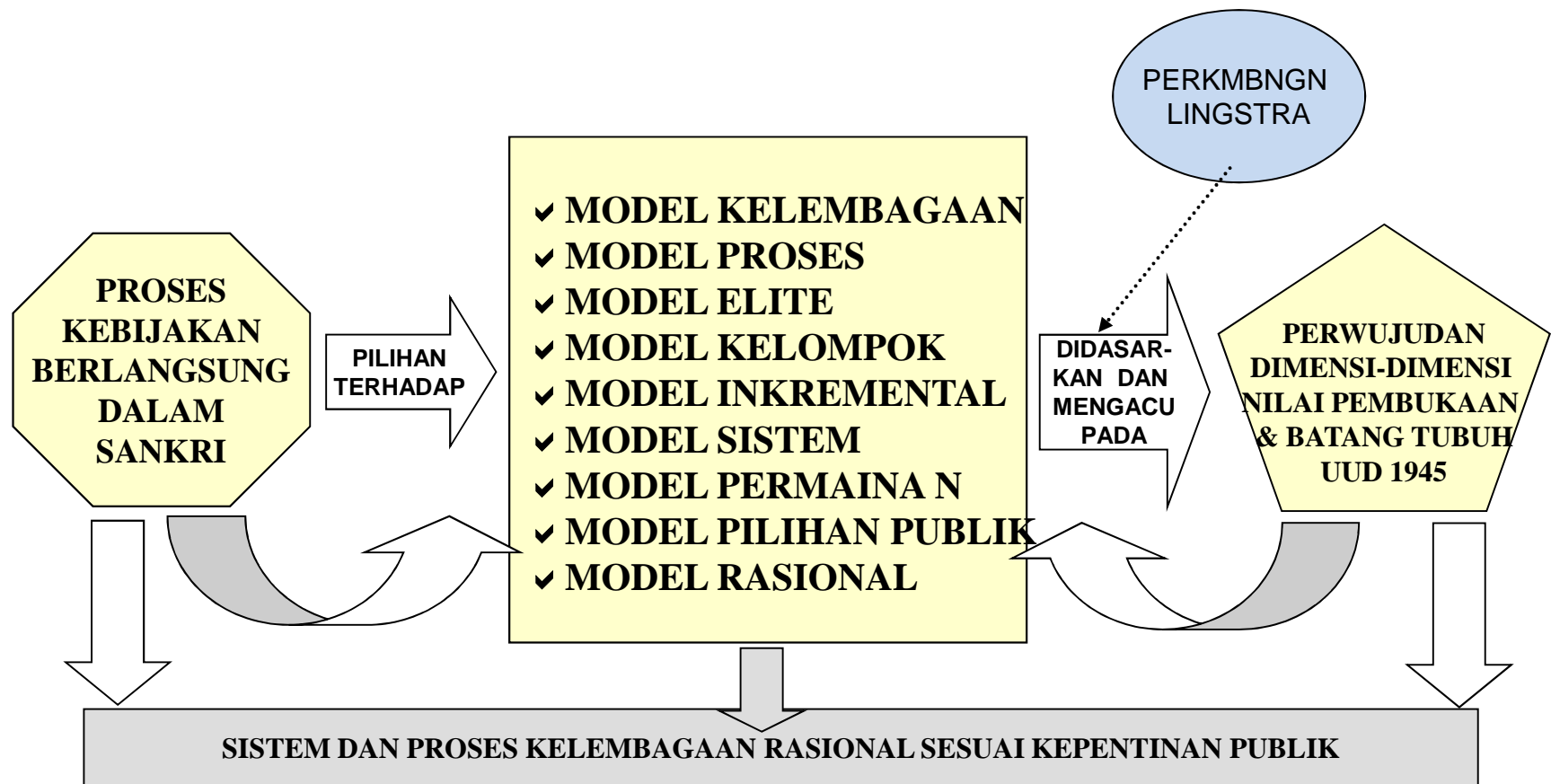
DALAM NEGARA YANG KONSTITUSIONAL DAN DEMOKRATIS, PENYELENGGARAAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN BANGSA UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA DILAKUKAN MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK. DI INDONESIA HAL TERSEBUT DIWADAHAI DAN DILANGSUNGKAN MELALUI SANKRI, YANG MEWADAHAI PULA KEHADIRAN ORGANISASI YANG BERKEMBANG SECARA DEMOKRATIS DAN DINAMIS DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT BANGSA.

- A. MODEL PROSES KEBIJAKAN DALAM NKRI**
- B. POSISI DAN PERAN KEBIJAKAN DALAM SISTEM PENYELENGGARAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN BANGSA (SANKRI)**
- C. KEBIJAKAN PUBLIK, DEFINISI KERJA**
- D. SISTEM DAN PROSES KEBIJAKAN, DIMENSI TEKNIS DAN SOSIOPOLITIS**
- E. CHALLENGES AND RESPONSES IN OUR HISTORY**

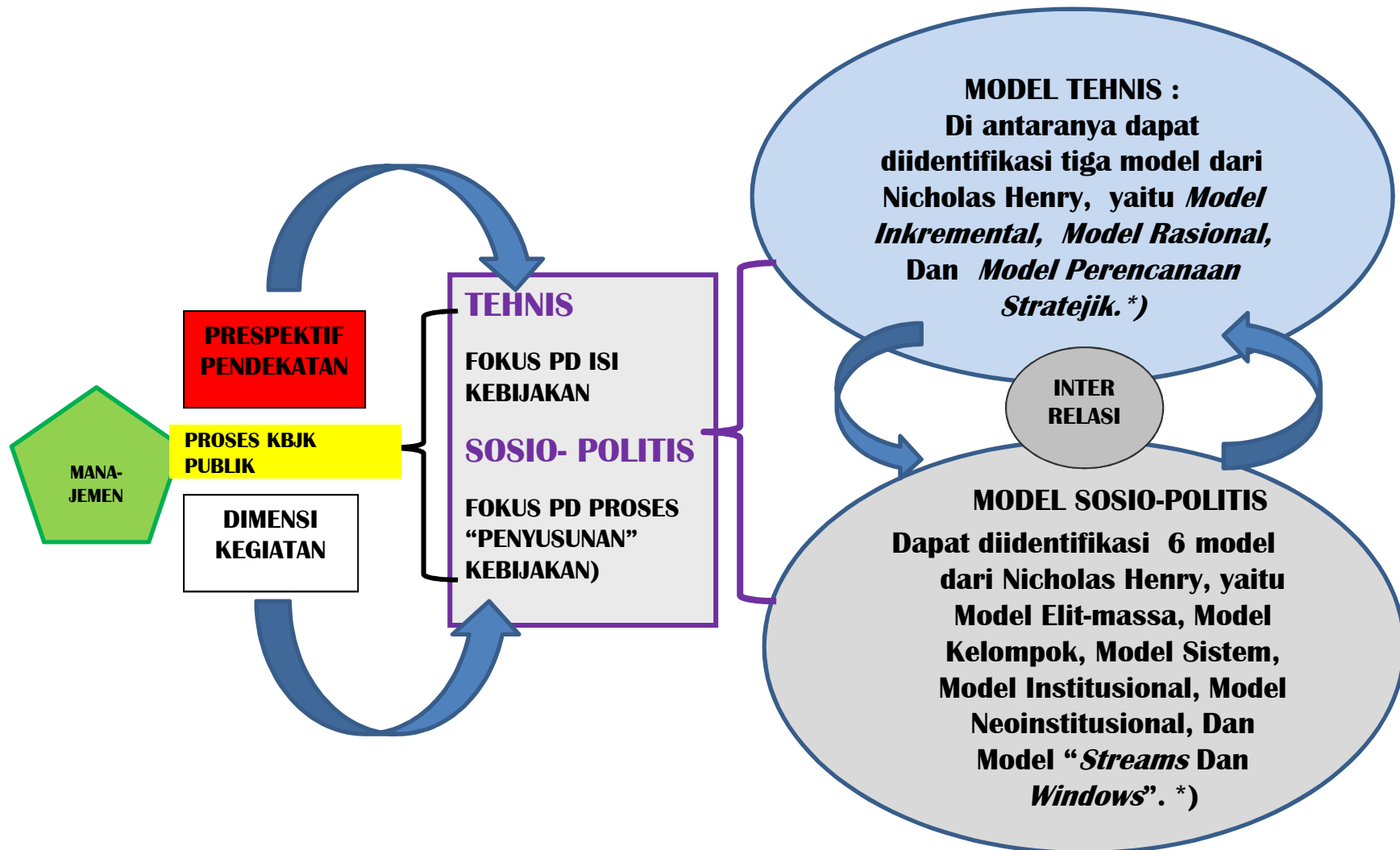
B. POSISI DAN PERAN KEBIJAKAN DALAM SISTEM PENYELENGGARAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN BANGSA (SANKRI)

B. POSISI DAN PERAN KEBIJAKAN DALAM SISTEM PENYELENGGARAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN BANGSA (SANKRI)

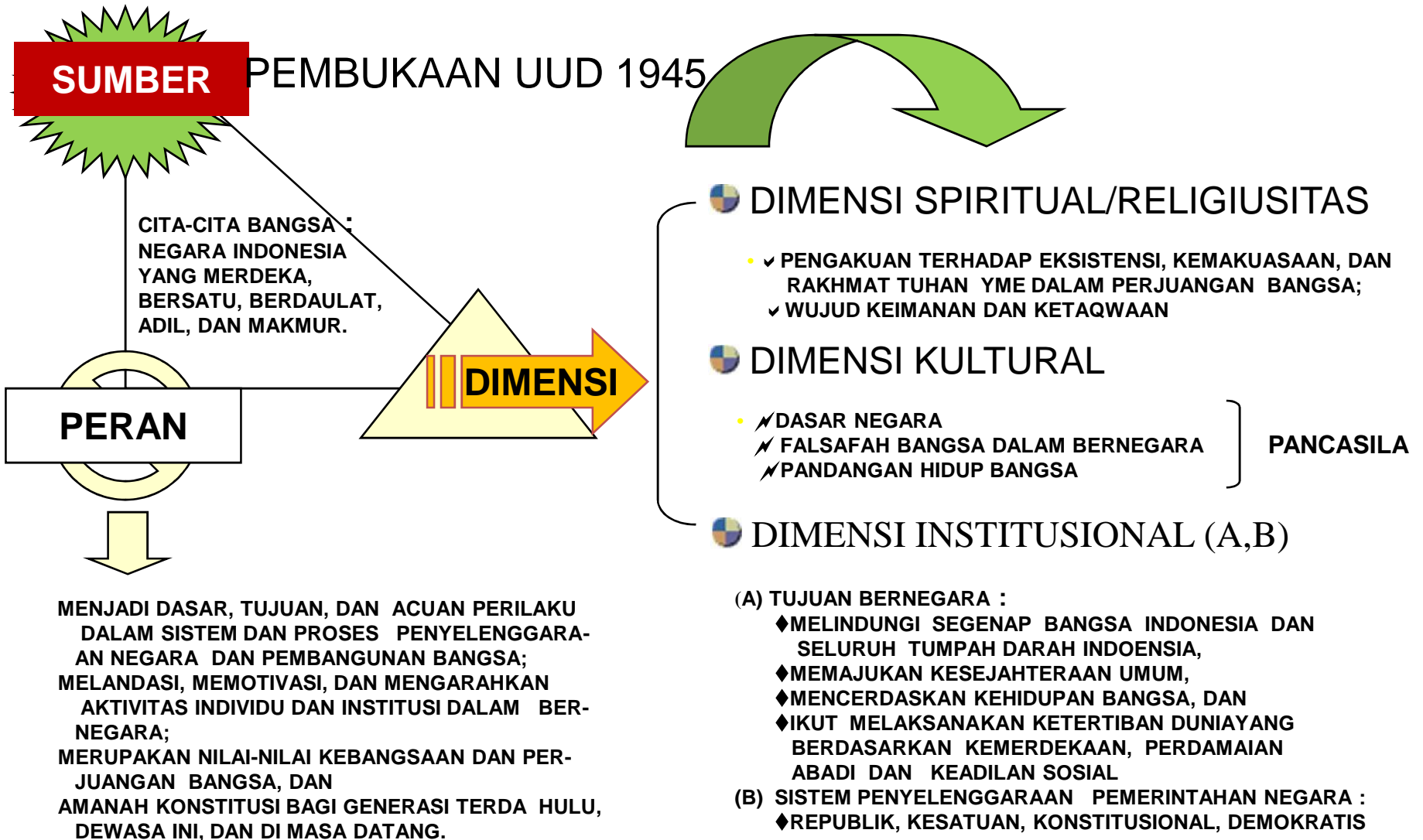
A. KONSTRUKSI MODEL PROSES KEBIJAKAN DALAM RANGKA NKRI



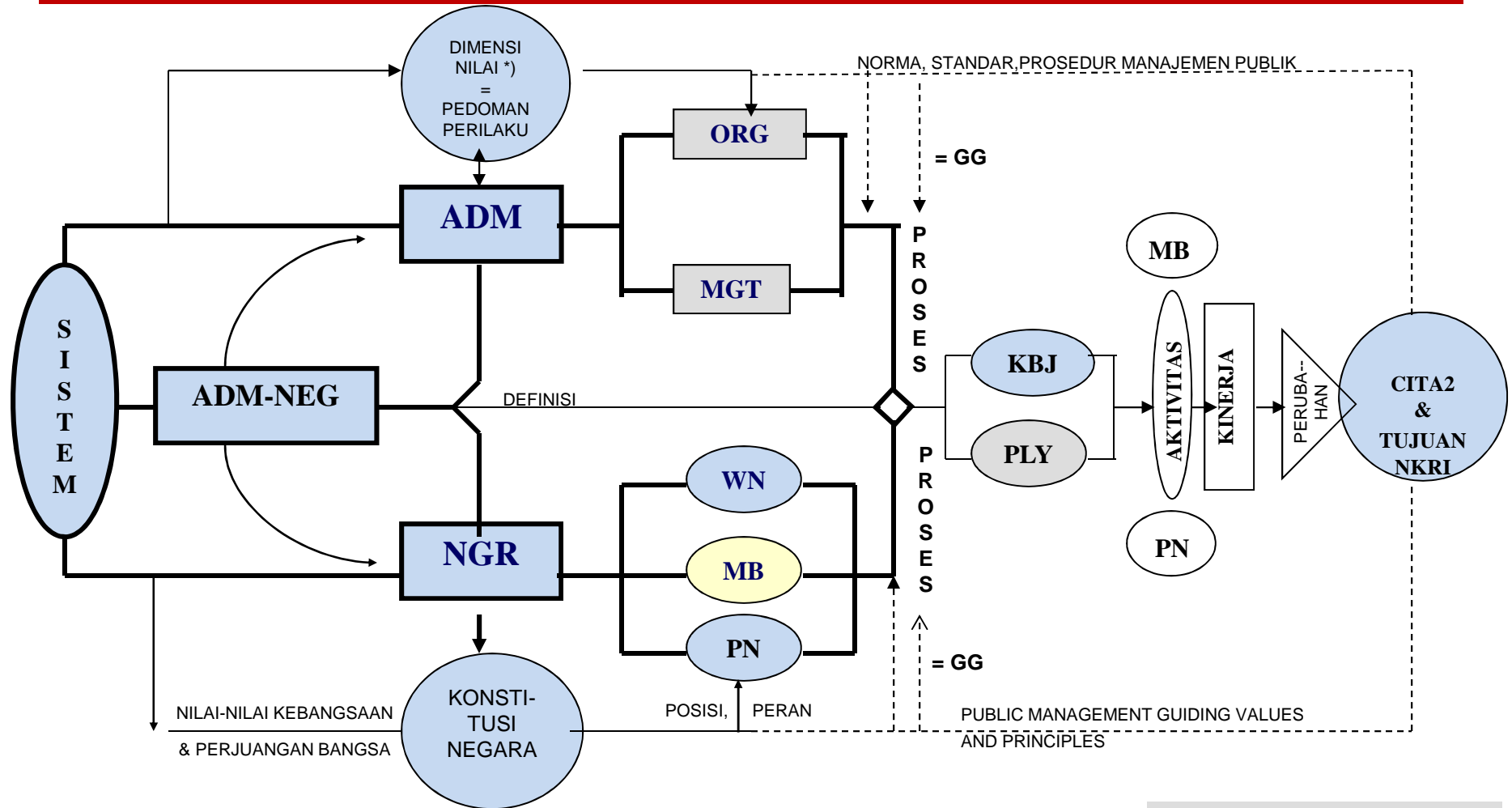
A. MODEL PROSES KEBIJAKAN PUBLIK



A. DIMENSI-DIMENSI NILAI PEMBUKAAN UUD SEBAGAI LANDASAN PARADIGMA DALAM PENGEMBANGAN SISTEM, PROSES, DAN INDIKATOR KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK DALAM (SA)NKRI



B. POSISI DAN PERAN KEBIJAKAN DALAM SISTEM PENYELENGGARAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN BANGSA (SANKRI)



***)DIMENSI NILAI PEMBUKAAN UUD'45**

- SPIRITUAL = ALINEA III (PENGAKUAN AKAN EKSISTENSI DAN KEMAHAKUASAAN ALLAH SWT DLM PERJUANGAN MERUBAH NASIB BANGSA)
- KULTURAL = ALINEA IV (DASAR NEGARA, PALSAFAH BERNEGARA, PANDANGAN HIDUP BNGS)
- INSTITUSIONAL = ALINEA IV (TUJUAN, BENTUK, DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA)

Notasi :

- MB = MASYARAKAT BANGSA,
- PN = PMERINTAHAN NEGARA
- WN = WILAYAH NEGARA,
- KBJ = KEBIJAKAN PUBLIK
- PLY = PELAYANAN PUBLIK
- ORG = PN, MB, DUNIA USAHA

B. ORGANISASI PEMERINTAHAN NEGARA

TATANAN ORGANISASI APARATUR PEMERINTAHAN NEGARA YANG BERADA PADA WILAYAH PEMERINTAHAN NEGARA TERDIRI DARI ORGANISASI/LEMBAGA EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF, BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH, DAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA, SERTA SALING HUBUNGANNYA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN BANGSA, TERMASUK DALAM PENYELENGGARAAN HUBUNGAN ANTAR NEGARA; DAN ORGANISASI KESEKRETARIATAN LEMBAGA-LEMBAGA TERSEBUT.

BERSAMA MASYARAKAT, BERPERAN MENGEMBAN MISI PERJUANGAN BANGSA MENCAPAI CITA-CITA DAN TUJUAN NKRI, SESUAI DIMENSI-DIMENSI NILAI PADA PEMBUKAAN UUD 1945

KEABSYAHAN KEHADIRAN Masing-masing lembaga ditentukan oleh karya dan kinerja masing-masing dalam mencapai tujuan NKRI.

B. POISISI KEBIJAKAN DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN NEGARA

PENGELOLAAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBANGUNAN DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN MASYARAKAT BANGSA DAN WILAYAH PEMERINTAHAN NEGARA; PADA DASARNYA MERUPAKAN PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN PADA UMUMNYA, SEPERTI **PENGELOLAAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PEMBIAYAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, PELAYANAN, PENGAWASAN, DAN PERTANGGUNG JAWABAN HASIL-HASILNYA DARI SETIAP ORGANISASI PEMERINTAHAN NEGARA.**

DALAM MENGEKAN TUGAS PEMERINTAHAN NEGARA YANG DEMIKIAN KOMPLEKS (MULTIDIMENSIONAL) DAN DINAMIK ITU, HARUS SENANTIASA DIPERHATIKAN DIMENSI-DIMENSI NILAI PEMBUKAAN UUD 1945 SERTA PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEJIK YANG DIHADAPI SECARA KONSISTEN, REALISTIS & RASIONAL, SEHINGGA TERWUJUD KESERASIAN STRATEGI DAN LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN YANG SECARA SISTEMATIS TERARAH PADA PENCAPAIAN TUJUAN NKRI. PERLU DIPERHATIKAN PARADIGMA-PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA DAN PEMBANGUNAN YANG RELEVAN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEJIK YANG DIHADAPI.

HAL INI MENGANDUNG MAKNA BAHWA KEBIJAKAN PUBLIK YANG BERISIKAN METODOLOGI ANALISIS KEBIJAKAN **HANYA AKAN MAMPU MELAKUKAN ADVOKASI KEBIJAKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU ATAU UNTUK MENGATASI MASALAH KEBIJAKAN TERTENTU SESUAI BIDANG TUGAS DAN FUNGSI Masing-Masing, APABILA JUGA MENGUASAI BIDANG ILMU PENGETAHUAN SESUAI BIDANG TUGAS PEMANGKU KETERKAIT. DAN SEMUA ITU MEMERLUKAN KOMPETENSI (INTEGRITAS, PENGETAHUAN, KEAHLIAN, DAN KETERAMPILAN DALAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN SISTEM MANAJEMEN YANG MANTAP. [DENGAN MENGINDAHKAN NILAI DAN PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK .**

B. FUNGSI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN NEGARA DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN LINGSTRA

PRIME GOVERNMENT MANAGEMENT FUNCTIONS : PLMPOSBDCON

- ✦ PLG = PLANNING
- ✦ PLM = POLICY MAKING
- ✦ O = ORGANIZING
- ✦ S = STAFFING
- ✦ B = BUDGETTING
- ✦ D = DIRECTING
- ✦ CON = CONTROLLING



WHAT'S TO DO

HOW TO DO

TUPOKSI
ORG

ANALISIS
SAINTIFIK/
KNOWLEDGE
BASE

METODA
TEHNIK. SOP

PERLU PENINGKATAN KOMPETENSI

C. MAKNA KEBIJAKAN PUBLIK

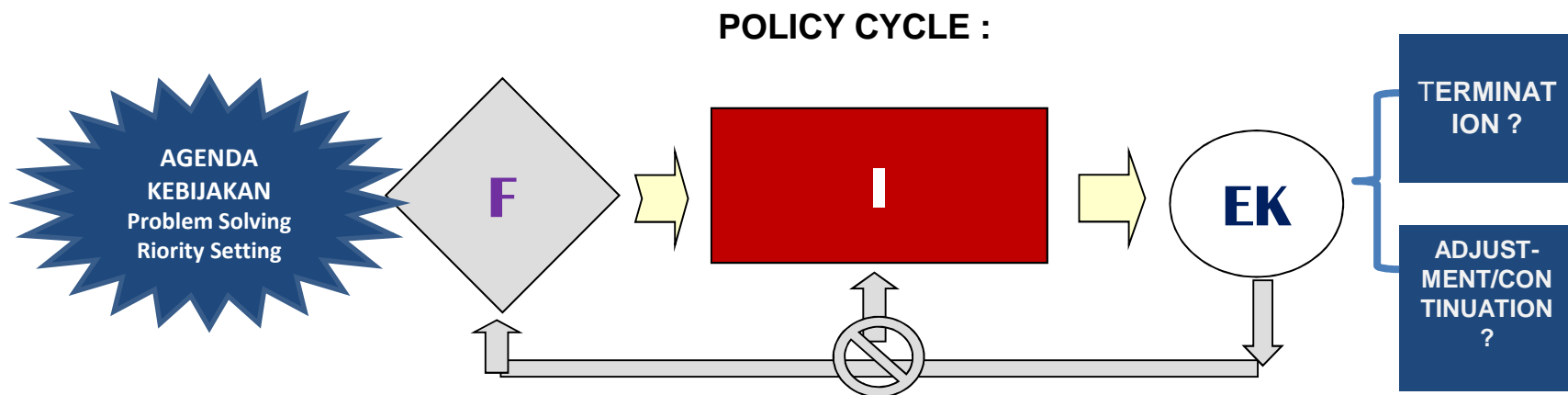
“SUATU KEPUTUSAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENGATASI PERMA-SALAHAN TERTENTU, MELAKUKAN KEGIATAN TERTENTU, ATAU UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU, YANG DILAKUKAN OLEH INSTANSI YANG BERKEWENANGAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERIN-TAHAN NEGERA DAN PEMBANGUNAN, BERLANGSUNG DALAM SUATU SISTEM KEBIJAKAN TERTENTU“

WUJUD DALAM KEHIDUPAN ADMINISTRASI NEGARA :



C. LINGKUP PROSES KEBIJAKAN (POLICY PROCESS)

BERBAGAI KEGIATAN DALAM SEBAGIAN ATAU PUN KESELURUHAN “POLICY CYCLE” [FORMULASI, IMPLEMENTASI, DAN EVALUASI KI-NERJA], BAIK KEGIATAN DALAM DIMENSI TEKNIS MAUPUN SOSIOPO-LITIS DALAM DINAMIKA SALING HUBUNGANANNYA DENGAN BERBAGAI UNSUR “POLICY SYSTEM”, YANG PERLU KITA PERHATIKAN DALAM MEMPELAJARI PROSES KEBIJAKAN, TERMASUK AGGENDA SETTING.

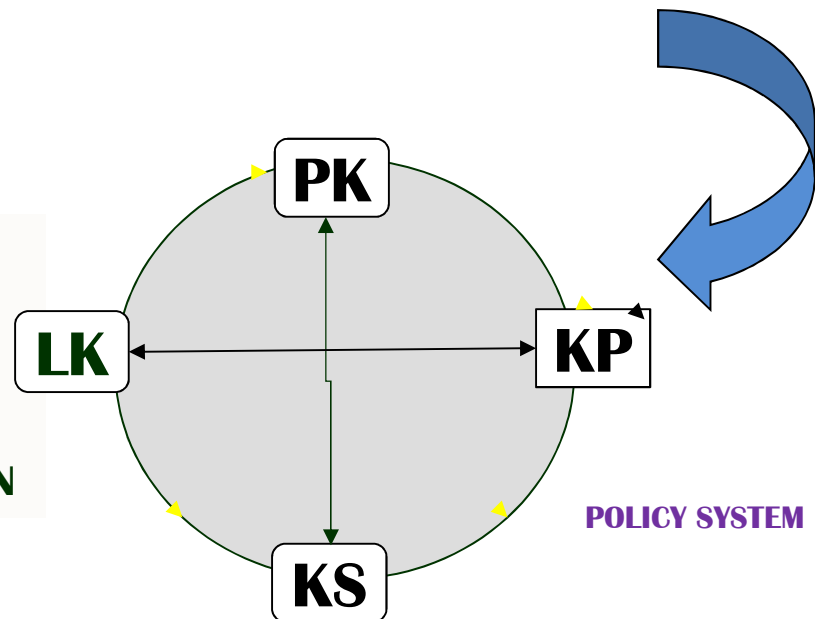


F = FORMULASI; I = IMPLEMENTASI; EK = EVALUASI KINERJA

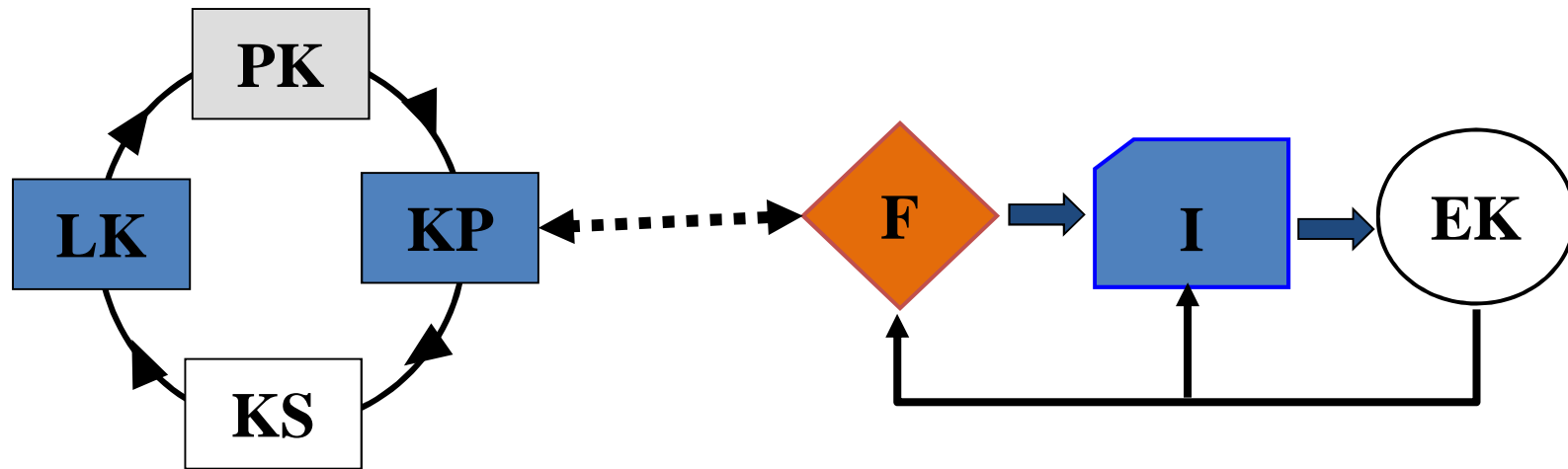
D. UNSUR DAN SALING HUBUNGAN ANTAR UNSUR DALAM SISTEM KEBIJAKAN (POLICY SYSTEM)

TATANAN KELEMBAGAAN YANG BERPERAN ATAU MERUPAKAN “WAHANA” DALAM PENYELENGGARAAN SEBAGIAN ATAU KESE-LURUHAN “PROSES KEBIJAKAN” (FORMULASI, IMPLEMENTASI, DAN EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN) YANG MENGAKOMODASI KEGIATAN TEHNIS (TECHNICAL PROCESS) MAUPUN SOSI-OPOLITIS (SOCIOPOLITICAL PROCESS) SERTA SALING HUBUNG-AN ATAU INTERAKSI ANTAR 4 EMPAT UNSUR DINAMIK :

- o LK = LINGKUNGAN KEBIJAKAN
- o PK = PENGELOLA KEBIJAKAN
- o KP = KEBIJAKAN ITU SENDIRI
- o KS = KELOMPOK SASARAN KEBIJAKAN



D. SALING HUBUNGAN “POLICY SYSTEM” DAN “POLICY CYCLE”.



POLICY SYSTEM

LK = LINGKUNGAN KEBIJAKAN;

PK = PENGELOLA KEBIJAKAN;

KP = KEBIJAKAN PUBLIK;

KS = KELOMPOK SASARAN

POLICY CYCLE

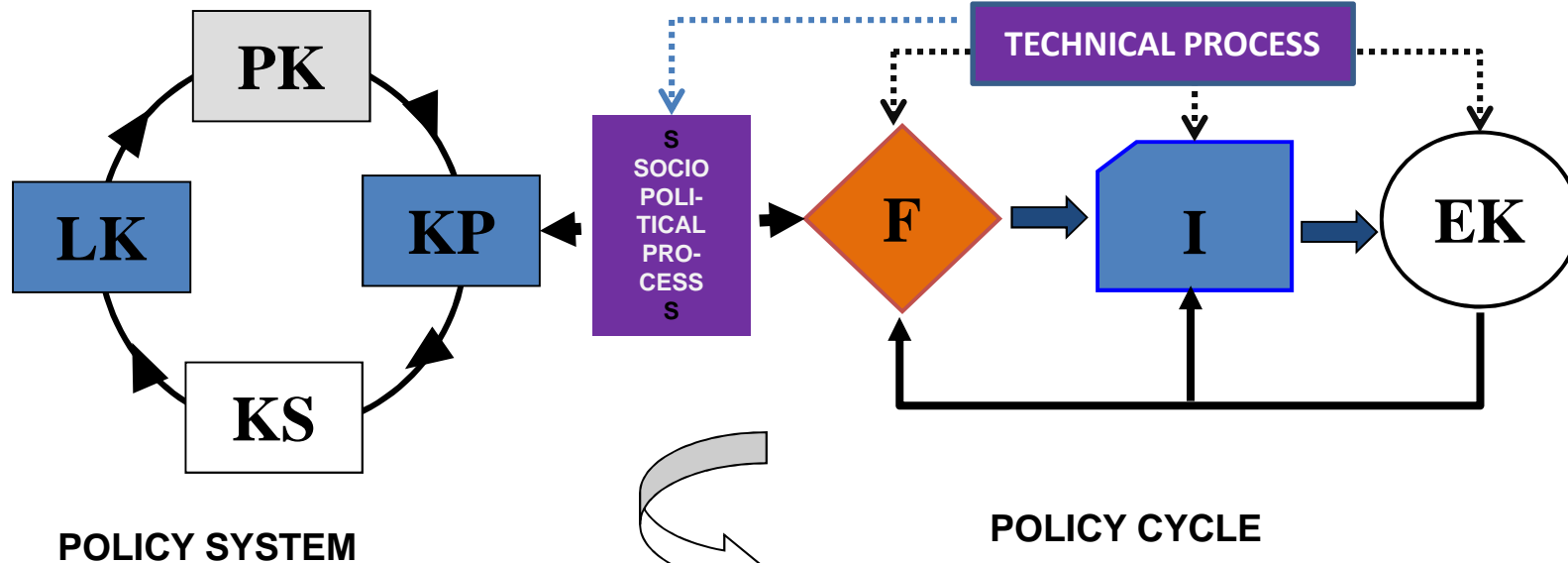
F = FORMULASI;

I = IMPLEMENTASI;

EK = EVALUASI KINERJA

[DLM RANGKA TAU, WAS, RIK
DAN PERTANGGUNG JAWABAN]

D. DIMENSI TEHNIS DAN SOSIOPOLITIS PROSES KEBIJAKAN



LK = MENGHADAPKAN BERBAGAI SUBSTANSI KEBIJAKAN YANG DIUSUNG BERBAGAI STAKEHOLDERS.

DEMIKIAN PULA PK YANG HARUS MEROSPEN BERBAGAI MASALAH KEBIJAKAN TERDIRI DARI SEJUM- LAH STKEHOLDERS.

DALAM HUBUNGAN ITU PARA PEJABAT PUBLIK HARUS MEMPER-HATIKAN POSISI DAN KONDISI KS..

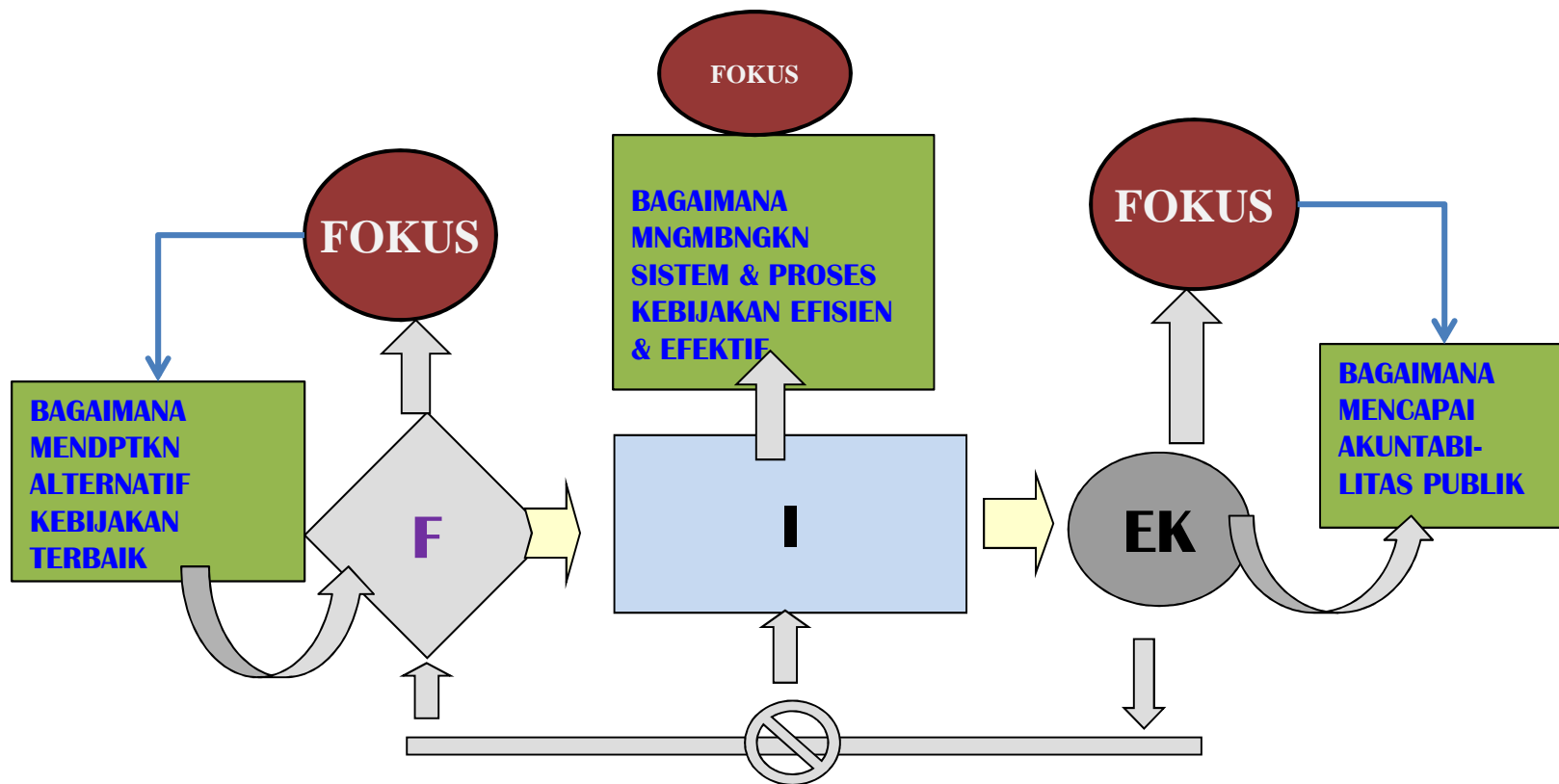
STRUKTUR DAN DINAMIKA POLICY SYSTEM TERSEBUT MENANDA/BERLANGSUNG PADA KESELURUHAN TAHAPAN "POLICY CYCLE"

F = FORMULASI;
I = IMPLEMENTASI;
EK = EVALUASI KINERJA

DI SAMPING DIMENSI TEHNIS,, MENGANDUNG DIMESI SOSIOPOLITIS,

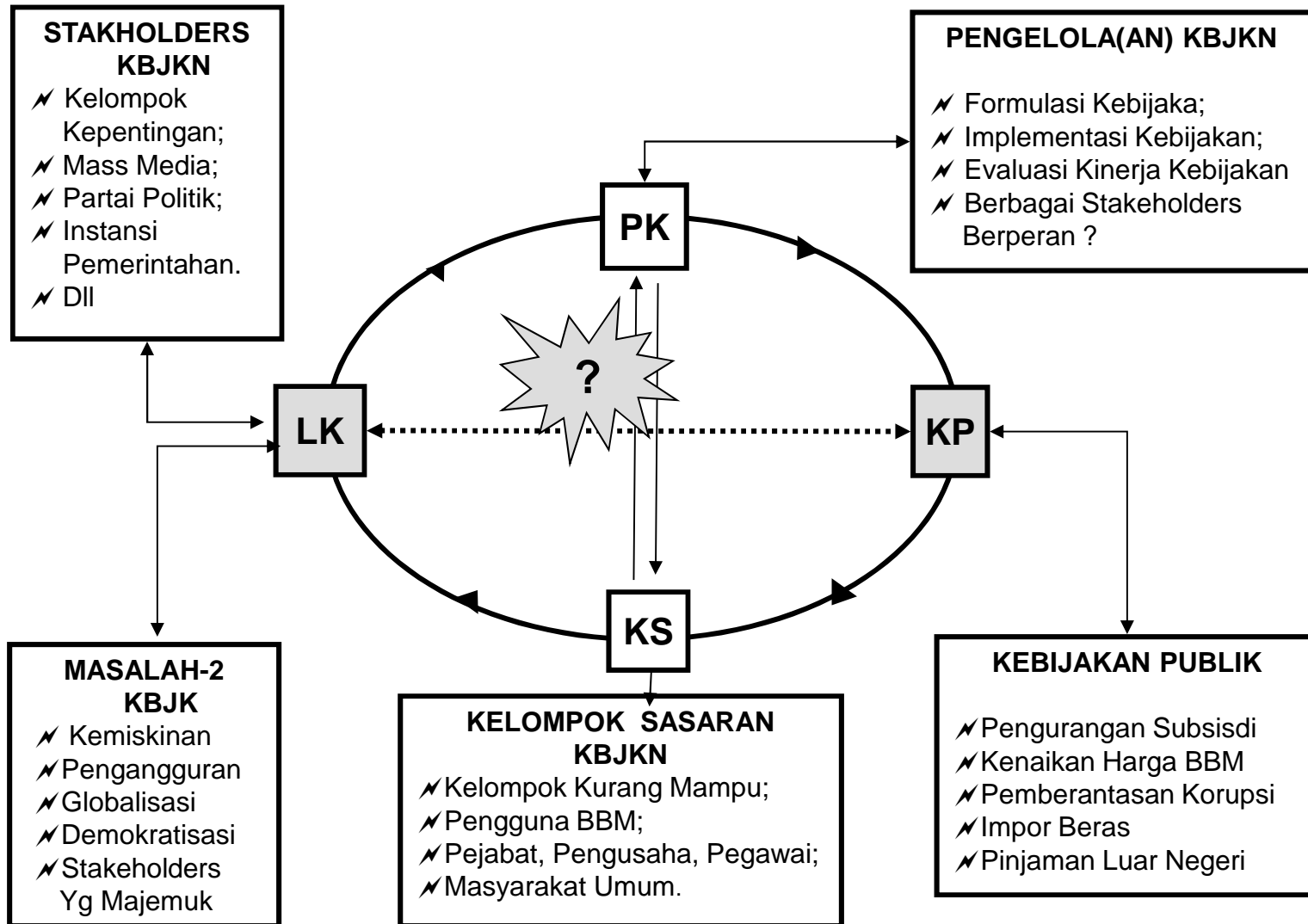
[EK DILAKUKAN DLM RANGKA TAU, WAS, RIK , DAN PERTANGGUNG JAWABAN]

D. FOKUS PERMASALAHAN KEBIJAKAN DALAM TAHAPAN PROSES KEBIJAKAN (POLICY CYCLE: F, I, E, K)

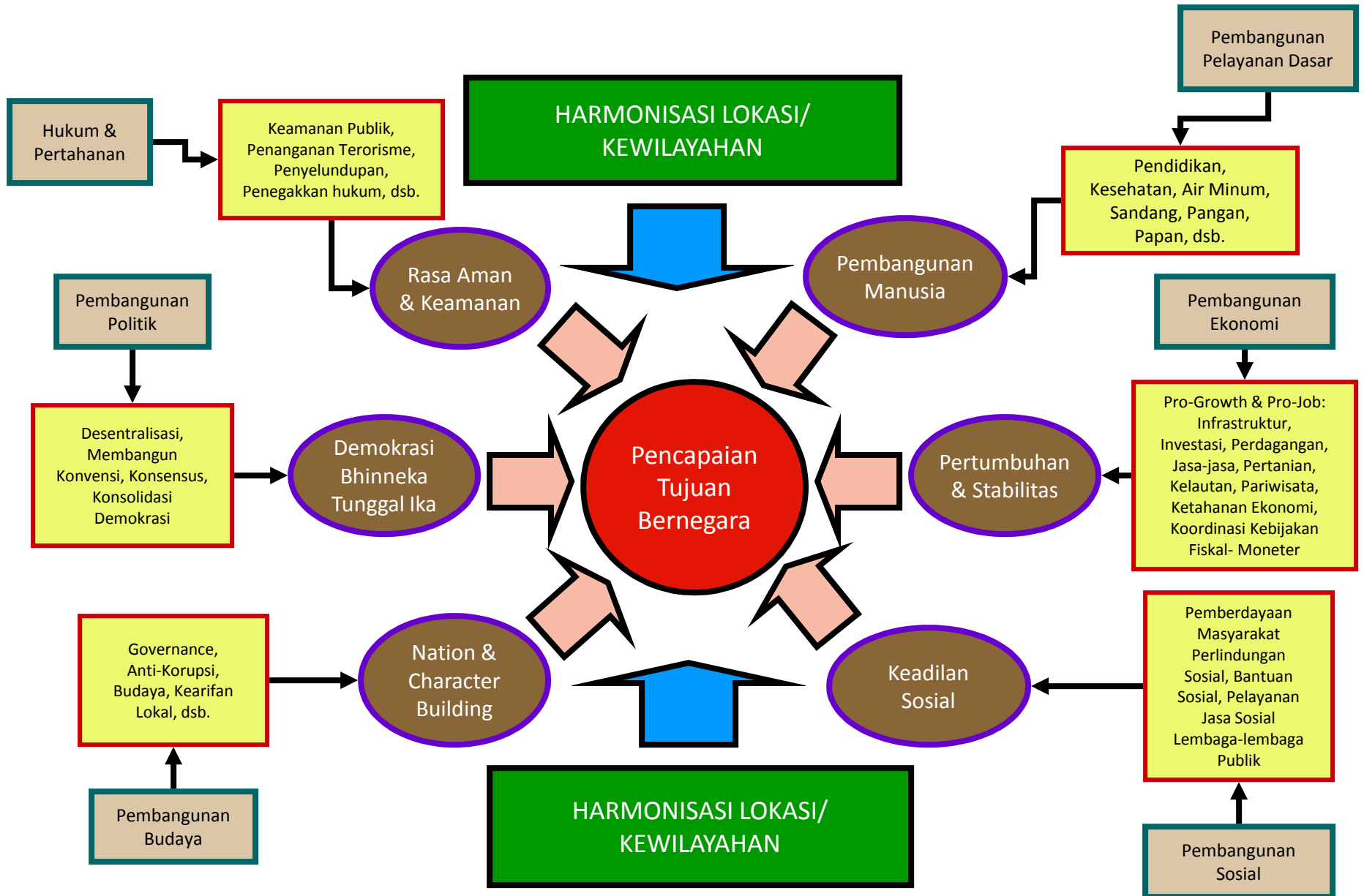


F = FORMULASI; I = IMPLEMENTASI; EK = EVALUASI KINERJA

D.KOMPLEKSISTAS DAN DINAMIKA SISTEM KEBIJAKAN



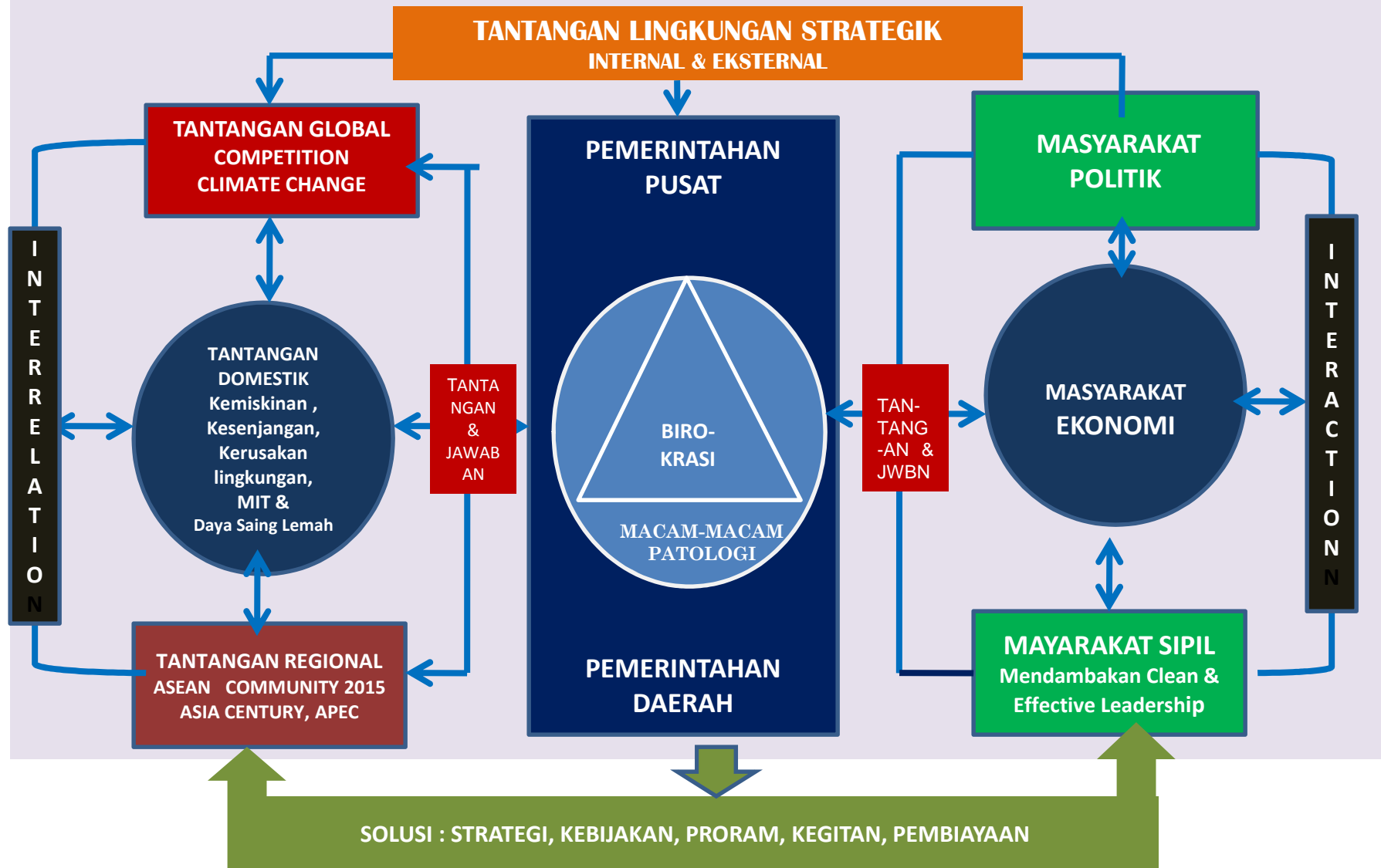
D. KOMPLEKSITAS DAN DINAMIKA LINGSTRANAS



Prof Mustopadidjaja AR; SE, MPIA, PhD.

D. KOMPLEKSITAS DAN DINAMIKA TANTANGAN DAN PERMASALAHAN :

LINGKUNGAN STRATEGIK (GLOBAL, REGIONAL & DOMESTIK), APARATUR NEGARA, DAN MASYARAKAT



HISTORICAL CHALLENGES

& RESPONSES : BAGAIMANA MEWUJUDKAN DIMENSI-DIMENSI NILAI PEMBUKAAN UUD 1945 KE DALAM VISI, MISI, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN KINERJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN



E. ANSWER IN OUR HISSTORY : PARADIGMA PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN INDONESIA

PARADIGMA PEMBANGUNAN							PEMBANGUNAN INDONESIA (69-98)		
No	Ekonomi (Sosial).	Mulai Ber-kembang	Alasan Pengembangan	Konsep Dasar Ekonomi	Konsep Dasar Adm Publik		Ekonomi Politik	Paradigma/ Konsep Dasar	Kinerja 3)
					Fred 1)	Must 2)			
1	Pertumbuhan	1950-an	Kunci Kemakmuran	<ul style="list-style-type: none"> • Big Push • Investasi • ICOR • Trickle down • Industrialisasi • Modernisasi 	• Birokrasi Klasik	<ul style="list-style-type: none"> • Struktural • Fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme Pasar disertai intervensi pemerintah • Orientasi Pasar • Steering > Rowing 	<ul style="list-style-type: none"> • Big Push, Pinjaman dan investasi • Substitusi Impor • Promosi Ekspor • Struktural Fungsional • Kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> • 1969-1994: 7% per tahun • Hutang LN 136,17 M US Dollar • 62% dari GDP
2	Pemerataan	1970an	Kemacetan "trickle down effect"	<ul style="list-style-type: none"> • Intervensi pemerintah yang egaliter • Rowing > Rowing 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan kemanusiaan • Pilihan Publik • Administrasi Negara Baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribution with growth • Growth with distribution • Basic Needs • Gini Rasio • Service delivery • Empowerment • Partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Behaviour • Sistemik • Kebijakan Publik • (Partisipatory) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan • Spesifik target group • Basic Needs • Service delivery • Subsidi • Pemberdayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Gini Index: 36,5
3	Pembangunan Berkelanjutan	1980an	Keterbatasan daya dukung SDA	<ul style="list-style-type: none"> • Konservasi SDA • Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Birokrasi Neo Klasik • Model Kelembagaan • Adm Negara Baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Struktural Fungsional • Behaviour • Sistemik • Kebijakan Publik (Partisipatory) 	<ul style="list-style-type: none"> • Globalism • Ecolabelling 	<ul style="list-style-type: none"> • Konservasi • Kemitraan • AMDAL 	
4	Kualitas Manusia	1990an	Manusia kunci & indikator sukses pemb.	<ul style="list-style-type: none"> • Social Learning • Capacity Building • Total Life Cycle and demention 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan kemanusiaan • Pilihan Publik • Administrasi Negara Baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Behaviour • Sistemik • Kebijakan Publik (Partisipatory) 	<ul style="list-style-type: none"> • Life Expectancy • School Enrollment Rate 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Manusia • Harapan Hidup • Angka Partisipasi sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Life expectancy HDI (1999) 0,677 (peringkat 102 pada negara MHD)
5	Daya Saing Nasional	2000-an	Persaingan global dlm pasar lokal, nasional, regional dan global	<ul style="list-style-type: none"> • Standarisasi • Efektivitas dan Efisiensi • Persaingan • Kemitraan Strategik 	<ul style="list-style-type: none"> • Model Kelembagaan • Pilihan Publik • Administrasi Negara Baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Struktural fungsional • Sistemik • Kebijakan Publik (Partisipatory) 	<ul style="list-style-type: none"> • Reinventing • Debirokratisasi • Deregulasi • E-commerce 	<ul style="list-style-type: none"> • Daya Saing Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Daya Saing Melemah: • Investment Flow • Tourism • Trade Ratio

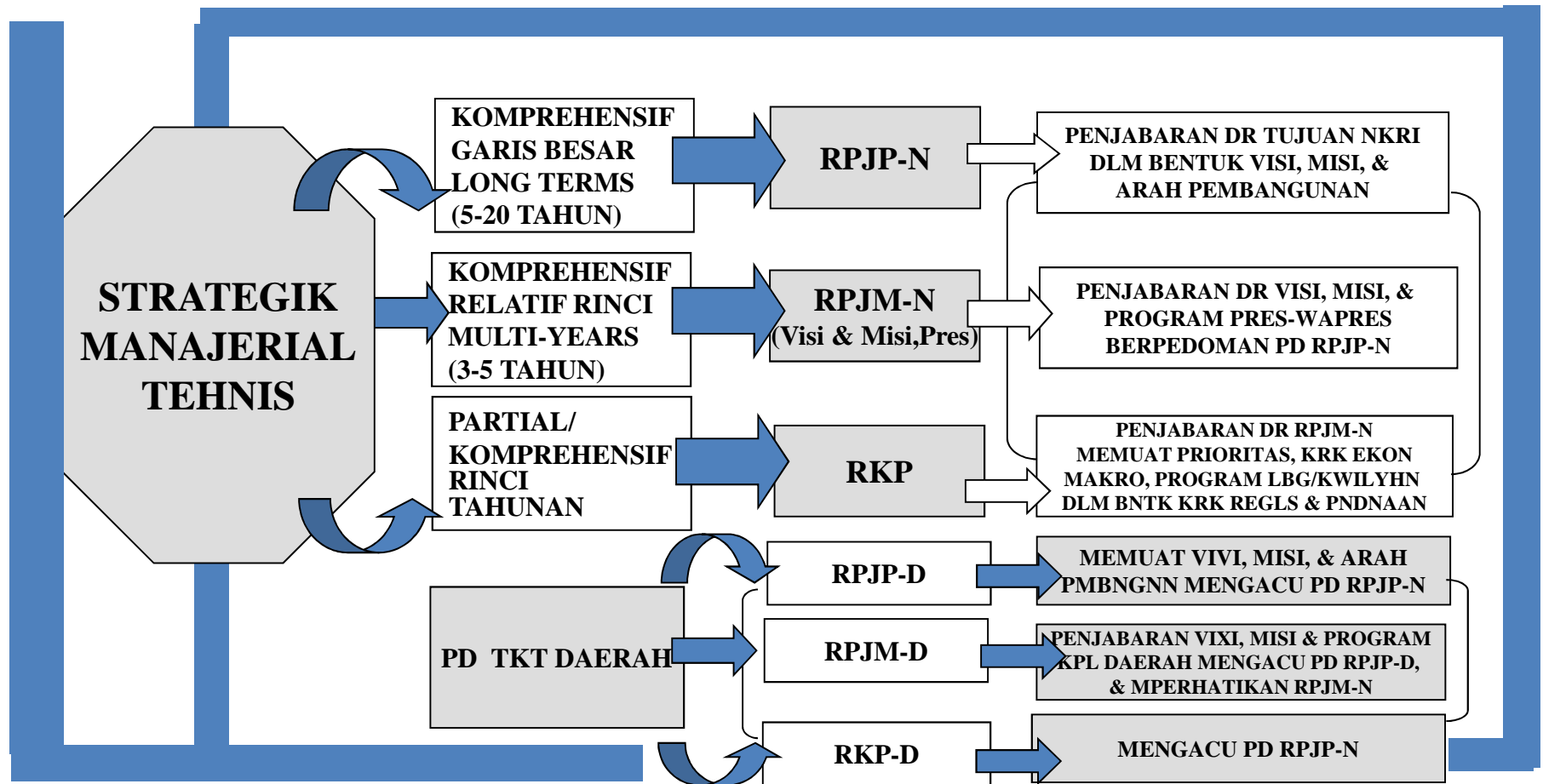
1) Fredrickson : (1) birokrasi klasik, (2) birokrasi neo klasik, (3) model kelembagaan, (4) hubungan kemanusiaan, (5) pilihan publik, (6) administrasi negara baru.

2) Mustopadidjaja : (1) struktural fungsional, (2) behavioural, (3) sistemik, (4) kebijakan publik (partisipatory).

3) Sumber Data : World Development Report 2000 ; memuat data tahun 1997 dan 1998, sebagai momentum akhir orde baru dan awal orde reformasi

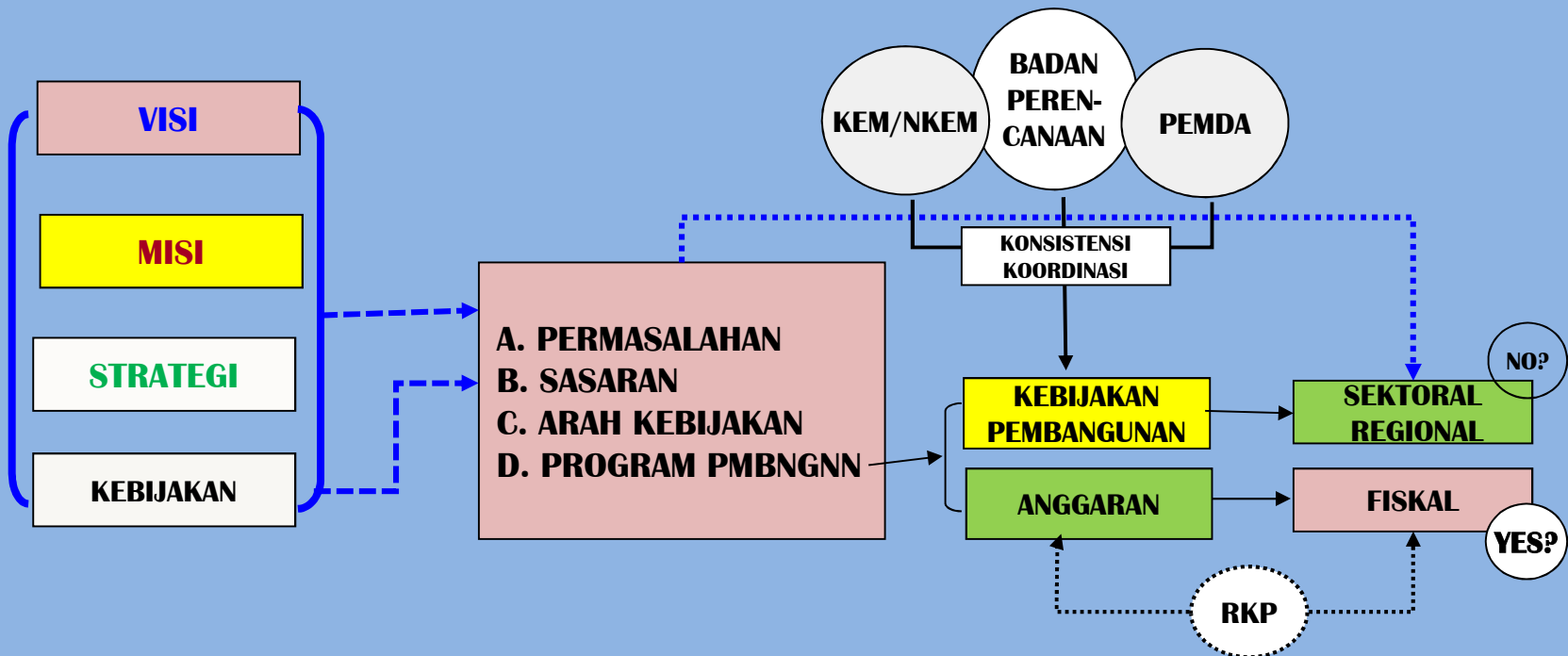
E. ANSWER IN OR HISTORY SKENARIO KEBIJAKAN DALAM KONTEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

MENURUT UU No 25 TAHUN 2004 TENTANG SPPN



D. ANSWER IN OUR HISTORY : INSTRUMENT KEBIJAKAN DALAM SISTEM DAN STRATEWGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ANALISIS KEBIJAKAN DRK OPERASIONALISASI RENCANA KEBIJAKAN



WE NEED POLICY RESEARCH, POLICY ANALYSIS, AND POLICY EVALUATION; EVEN WE POSSIBLY NEED DIFFERENT SCENARIO, AND SOME OTHER NEW INITIATIVE AND INNOVATION

E. PERBANDINGAN BEBERAPA MODEL ANALISIS KEBIJAKAN (Jones, Dunn, Owen, & Mustopadidjaja AR)

D1 JONES : PERCEPTION/DEFINITION, AGGREGATION, ORGANIZATION, REPRESENTATION, AGENDA SETTING, FORMULATION, LEGITIMATION, BUDGETING, IMPLEMENTATION, EVALUATION, ADJUSTMENT/TERMINATION

D2 DUNN'S

- ✓ Structuring Policy problems;
- ✓ Forecasting Policy Future;
- ✓ Recommending Policy Action;
- ✓ Monitoring Policy Outcomes;
- ✓ Evaluating Policy Performances.

D3 OWEN'S

- ✓ Verify, define, and detail the problem;
- ✓ Established evaluation criteria;
- ✓ Identify Alternative policies;
- ✓ Evaluate alternative policies;
- ✓ Display & select among alternative policies;
- ✓ Monitor policy outcomes.

D4 MUSTOPADSDJAJA'S FORMULASI

- ✓ Pengkajian permasalahan;
 - ✓ Penyusunan Model;
 - ✓ Penentuan Tujuan;
 - ✓ Pengembangan Alternatif;
 - ✓ Penentuan Kriteria Penilaian;
 - ✓ Penilaian Alternatif
 - ✓ Rekomendasi Kebijakan.
- IMPLEMENTATION.**
PERFORMANCE EVALUATION

**SAMA-SAMA FOKUS PADA MASALAH KBIJAKAN YANG
DIHADAPI; PENDEKATAN DI-1 MELENGKAPI LANGKAH-LANGKAH D2, D, DAN D4**

E. KEGIATAN POKOK DAN KOMPETENSI DASAR JF-AK

NO	LANGKAH	KASUS *)			CATATAN
		SEKTORAL	REGIONAL	INSTITUSIONAL	
		Peningkatan daya saing PTN atau PTS pada masyarakat dalam dan luar negeri, DSI.	Pengembangan daya tarik kawasan andalan, DTI.	Peningkatan kemandirian lembaga swadana, KLSi.	*) Kasus dalam uraian ini merupakan contoh. Peserta/ Widyaiswara/Mahasiswa/Dosen sebaiknya memilih permasalahan lain.
1.	Pengkajian Permasalahan	a. Siapa yang merupakan <i>target group</i> b. Bagaimana kondisinya c. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi DSI.	a. Siapa yang merupakan <i>target group</i> b. Bagaimana kondisinya c. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi DTI	a. Siapa yang merupakan <i>target group</i> b. Bagaimana kondisinya c. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi KLSi	a. Pilih permasalahan dengan informasi yang paling dikuasai/ lengkap; b. Strukturkan permasalahan yang dipilih menurut " <i>causal order</i> " tertentu c. Jabarkan dlm <i>dependent (Y)</i> dan <i>independent (X)</i> variabels
2.	Penyusunan "Model"	a. Rumusan saling hubungan daya saing (Y_i) dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (X_i) b. Meningkatkan DSI PTS/PTN pada masyarakat luar negeri.	a. Rumusan saling hubungan daya tarik (Y_i) dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (X_i) b. Meningkatkan DTI, daya tarik kawasan andalan.	a. Rumusan saling hubungan kemandirian (Y_i) dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (X_i) b. Meningkatkan kemandirian pembangunan lembaga swadana, KLSi	a. Rumuskan <i>objective</i> atau <i>targets</i> berdasarkan kajian/pertimbangan realistik b. Alternatif kebijakan dikembangkan dari <i>independent variables</i> tersebut pada (3).
3.	Perumusan Tujuan	Justifikasi alternatif realistik dari model-model yang diantisipasi akan digunakan pada perguruan tinggi negeri atau swasta.	Justifikasi alternatif realistik dari model-model yang diantisipasi akan digunakan pada kawasan andalan.	Justifikasi alternatif realistik dari model-model yang diantisipasi akan digunakan pada lembaga swadana.	

E. KEGIATAN POKOK DAN KOMPETENSI DASAR JF-AK

4.	Pengem-bangan Alternatif Kebijakan	P-DS(pts/ptn) Q-DS(pts/ptn) R-DS(pts/ptn) S-DS(pts/ptn)	P-DT1 Q-DT2 R-DT3 S-DT4	P-KLS1 Q-KLS2 R-KLS3 S-KLS4	Terdapat beberapa alternatif kebijaksanaan (P,Q,R,S) utk mencapai tujuan.
5.	Pemilihan Kriteria	a. Ekonomi; b. Sosial; c. Politik; d. Administrasi e. dll	a. Ekonomi; b. Sosial; c. Politik; d. Administrasi e. dll	a. Ekonomi; b. Sosial; c. Politik; d. Administrasi; e. dll	a. Pilihlah kriteria yang paling relevan b. Tentukan bobot setiap kriteria c. Apakah bobot $g = h = i = j$; Kenapa ? d. Kuantifikasi pembobotan
6.	Penilaian Alternatif Kebijakan	a. Penilaian alternatif berdasarkan kriteria dan pembobotannya; b. Buat matrik penilaian alternatif dengan perkiraan kelaikannya	a. Penilaian alternatif berdasarkan kriteria dan pembobotannya; b. Buat matrik penilaian alternatif dengan perkiraan kelaikannya	a. Penilaian alternatif berdasarkan kriteria dan pembobotannya; b. Buat matrik penilaian alternatif dengan perkiraan kelaikannya	a. Lakukan penilaian setiap alternatif berdasar butir (6) b. Rekapitulasi hubungan penilaian pada matrik penilaian (kolom 9)
7.	Rekomendasi Kebijakan	a. Rumusan alternatif-alternatif yang direkomendasikan b. Rumusan-rumusan hal-hal yang perlu di siapkan guna mencapai sukses pelaksanaan kebijakan; termasuk pemantauan evaluasi kinerja	a. Rumusan alternatif-alternatif yang direkomendasikan b. Rumusan-rumusan hal-hal yang perlu di siapkan guna mencapai sukses pelaksanaan kebijakan; termasuk pemantauan evaluasi kinerja	a. Rumusan alternatif-alternatif yang direkomendasikan b. Rumusan-rumusan hal-hal yang perlu di siapkan guna mencapai sukses pelaksanaan kebijakan; termasuk pemantauan evaluasi kinerja	a. Rekomendasi dapat satu atau beberapa alternatif; b. Antisipasi beberapa hal yang perlu peningkatan dalam pelaksanaan

E. YOUR OPPORTUNITY

To revive the Constitutional Spirit Within Its Policy System, Process, and Performances

• PEMBUKAAN UUD 1945

- Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
- Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
- Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
- Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- _____
- (Terdapat tiga dimensi nilai dalam Pembukaan UUD 1945 yang perlu diperhatikan dalam sistem dan proses kebijakan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan Indonesia, yaitu (1) Dimensi Spiritual, berisikan keyakinan akan eksistensi dan kemahakuasaan Allah YMK yang termaktub dalam Alinea Ketiga, dan (2) Dimensi Kultural yang mereleksikan pandangan hidup bangsa dan falsafah Negara serta (3) Dimensi institusional yang terjabarkan dalam Cita-cita dan Tujuan NKRI serta cara-cara pencapaiannya secara konstitusional dan demokratis, yang termaktub dalam Alinea Keempat) Prof. Mustopadidjaja AR, Dimensi-Dimensi Pokok Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, LAN, 2003.
-

SEKIAN,
SELAMAT BERJUANG,
SEMOGA SUKSES
Majulah negeriku, jayalah bangsaku

Jakarta, 29 April 2014

Mustopadidjaja AR

E-mail : musto.ar@gmail.com